

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran DP3AP2 DIY dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2022 hingga Juni 2025 belum efektif secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan fluktuasi angka penanganan kasus yang tidak menunjukkan tren penurunan yang konsisten, pada tahun 2022 tercatat penanganan kasus kekerasan sebanyak 1.282 kasus, yang pada tahun 2023 DP3AP2 DIY dapat menekan jumlah kekerasan di DIY menjadi 1.187, namun melonjak signifikan menjadi 1.326 kasus pada tahun 2024, serta akumulasi 606 penanganan kasus hanya dalam semester pertama tahun 2025. Tingginya angka penanganan ini merepresentasikan bahwa meskipun kebijakan sudah diregulasikan dan adanya lembaga-lembaga internal masih belum mampu mencegah akar penyebab kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan. Focus DP3AP2 DIY yang masih dominan pada aspek kuratif/penanganan pasca kejadian menyebabkan fungsi pencegahan (preventif) menjadi tidak optimal, sehingga jumlah kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berada pada angka yang tinggi dan cenderung meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terutama pada anak dan perempuan masih memiliki hambatan terutama apabila penanganan dilakukan secara komprehensif yang harus melibatkan banyak pihak membuat kinerja DP3AP2 DIY menjadi lebih lambat, keterbatasan daerah dalam memberikan fasilitas dan biaya juga menjadi salah satu kendala yang masih sering terjadi di Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) DIY. Penanganan kasus yang *Locus Delicti*-nya berada di luar wilayah Indonesia, tidak menutup keberhasilan DP3AP2 DIY dan Balai PPA meraih angka target yang harus dicapai setiap tahunnya, meskipun hal tersebut membuat penjangkauan menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang cukup lama.

B. Saran

Mengingat tingginya volume penanganan kasus yang mencapai puncaknya pada tahun 2024 dan terus berlanjut di tahun 2025 perlu dilakukan regulasi mengenai penanganan yang dilakukan secara komprehensif guna meminimalisir waktu kinerja DP3AP2 DIY dalam hal memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Daerah DIY juga diharapkan dapat memberikan dukungan alokasi anggaran yang lebih representatif bagi program perlindungan perempuan dan anak guna

memaksimalkan penanganan kasus kekerasan. Membangun kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diluar Indonesia guna memudahkan penanganan kasus apabila berada diluar jangkauan Indonesia, serta mengubah strategi pencegahan kekerasan yang diterapkan oleh DP3AP2 DIY dengan maksud mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriasih Dita, 2019, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Kemenpppa, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fransiska Novita dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Jakarta.
- Khairunisa, 2021, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan*, Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 48, Medan.
- Moerti, Hadiarti, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Alumni, Bandung.
- Nurhayanti Sylvianti, 2024, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2024*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jakarta.
- Sitepu Pribudiarta, 2024, *Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak Dinamika Implementasi Kebijakan Pengasuhan Dan Partisipasi Anak*, Kemenpppa, Jakarta.
- Subandi Sardjoko, 2022, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Zulkifli Ismail, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

Penelitian Hukum

Alfian Kusuma Candra, 2024, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Georgia Dimar Ning Ratri, 2025, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ludhfi Arfi Andika, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di daerah istimewa Yogyakarta (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Jurnal Hukum

Alexandra Amadea Christinne dkk, 2025, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* Volume 02 Nomor 02 Tahun 2025, Universitas Bandar Lampung.

Anissa Triana, 2019, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Balikpapan”, *EJournal Sosiatri-Sosiologi* Volume 07, Nomor 23

Tiffania Anjani dkk, 2025, “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan

Terhadap Perempuan Di Kota Bandung”, *Jurnal Praxis Idealis, Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, Volume 02 Nomor 02 Tahun 2025, Universitas Jenderal Achmad Yani.

Wilda Amananti, 2024, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, *Jurnal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Volume 04 Nomor 02 Tahun 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1355 Tahun 2022. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2023. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Internet

<https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses 9 Oktober 2025.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 9 Oktober 2025.

<https://jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah>, diakses 9 Oktober 2025.

Maturidi, 2019, Peranan Masyarakat Dalam dakwah Di Kecamatan Bukti kemuning

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30464/9.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses 9 November 2025.